

**PENGARUH PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP FAKTOR-
FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Surakarta)**



NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

RISSA WIDYAWATI

B 200 090 229

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

**PENGARUH PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR
PAJAK**

(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Surakarta)

RISSA WIDYAWATI

B 200 090 229

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Program *Sunset Policy* terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Surakarta)” bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen: *Sunset Policy* terhadap variabel dependen yaitu Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Prataman Surakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik convenience sampling. Dari teknik pengambilan sampel tersebut didapatkan sampel berjumlah 100 sampel. Jumlah sampel yang dapat diolah dan dianalisis berjumlah 73 kuesioner. Data dianalisis menggunakan analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Sunset policy* berpengaruh secara signifikan terhadap Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan, dan Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan karena memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Kata kunci: *Sunset Policy, Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman akan Peraturan Perpajakan, Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan.*

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**PENGARUH PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Surakarta)**

Yang ditulis oleh:

RISSA WIDYAWATI

B 200 090 229

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2013

Pembimbing


(Dra. Mujiyati, M.Si)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE., M.Si)

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar. Kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini dihasilkan dari pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa diharapkan lagi. Penerimaan dari sumber daya alam memiliki umur yang terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Berbeda dengan pajak yang mempunyai umur tidak terbatas, dengan melihat semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Widayati dan Nurlis (2010) dalam penelitiannya memaparkan pemungutan pajak bukan pekerjaan mudah, selain peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberikan wewenang kepada wajib pajak baik menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, mengakibatkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.

Anggraeni (2011) sebagai upaya dalam melakukan terobosan khususnya dalam penggalan potensi perpajakan, pemerintah yang dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008 telah mengeluarkan kebijakan pajak bagi Wajib Pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan atas pelaporan pajak tahun-tahun yang lalu dan juga memberikan kelonggaran

bagi masyarakat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang dikenal dengan *Sunset Policy*.

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007) dalam Rantung dan Adi (2009). Adapun Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut Pasal 37A Ayat 1 berbunyi Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 37A Ayat 2 berbunyi Wajib Pajak orang pribadi yang sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Syarat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Sunset Policy merupakan *tax amnesty* dengan tingkat yang paling rendah. *Tax amnesty* adalah peluang dalam periode tertentu bagi wajib pajak untuk membetulkan laporan pajaknya dan membayar jumlah tertentu demi mendapatkan pengampunan berkaitan dengan kewajiban pajaknya (termasuk bunga dan sanksi administrasi) di masa lalu atau masa tersebut dengan jaminan bebas dari tuntutan pidana. Suryarini dan Anwar (2010) menyatakan bahwa *Sunset policy* hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasi. Pidana fiskal juga otomatis gugur jika wajib pajak melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkan atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasilitas *sunset policy*. Pemberian fasilitas ini juga dibatasi selama satu tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.

Diharapkan adanya kebijakan *sunset policy* ini dapat meningkatkan kemauan membayar pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penghapusan sanksi diharapkan dapat menstimulus wajib pajak untuk membayar pajak, baik atas kekurangan pembayaran sspajak di masa lalu maupun untuk pembayaran pajak selanjutnya. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PENGARUH PROGRAM *SUNSET POLICY* TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan di Surakarta)”**.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Sunset Policy*

Sunset Policy adalah fasilitas penghapusan sanksi administrasi pajak berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Direktorat Jenderal Pajak, 2007) dalam Rantung dan Adi (2009). Adapun pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 selengkapnya dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 2.1
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 37A

Ayat 1	Ayat 2
Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.	Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.

Sumber: (Dirjen Pajak, 2007)

Untuk dapat memanfaatkan program *Sunset Policy*, wajib pajak harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

Tabel 2.2
Persyaratan Pemanfaatan *Sunset Policy*

Wajib Pajak Baru	Wajib Pajak Lama
a) Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dalam tahun 2008 – April 2009.	a) Telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008.
b) Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan,	b) Terhadap SPT Tahunan PPh yang dibetulkan belum diterbitkan SKP.
	c) Terhadap SPT Tahunan PPh yang

penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.	dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak belum menyampaikan SPHP.
c) Menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009.	d) Telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan.
d) Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT tahunan PPh, sebelum SPT tersebut disampaikan.	e) Tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan
	f) Menyampaikan SPT Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008
	g) Melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian SPT Tahunan PPh, sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan.
	h) PPh sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c adalah PPh yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

Sumber: (Dirjen Pajak, 2007)

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan sanksi administrasi dalam program *Sunset Policy* adalah (1) penghapusan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP, (2) penyampaian dan pembetulan SPT yang salah, dan (3) penghapusan sanksi administrasi atas kurang bayar pajak.

Program *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT Tahunan PPh. *Sunset Policy* diberlakukan dalam jangka waktu terbatas dan merupakan bagian dari program pengampunan pajak yang diterapkan dalam perpajakan Indonesia.

Sanksi perpajakan ditetapkan dengan beberapa pasal dalam UU Nomor 28 Tahun 2007. Sanksi perpajakan yang dapat dikenakan kepada

wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan secara benar melalui program *Sunset Policy* dalam Rantung dan Adi (2009) diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.5
Sanksi Perpajakan terkait Program *Sunset Policy*

Bentuk Pelanggaran	Sanksi
Tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP (tidak memiliki NPWP).	(Pasal 39) <ul style="list-style-type: none"> Sanksi Administrasi : Denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi pidana: Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
Penyampaian SPT melewati jangka waktu yang ditentukan.	(Pasal 7) <ul style="list-style-type: none"> Sanksi administrasi : Denda sebesar Rp 1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Denda sebesar Rp 100.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Sudah menyampaikan SPT tepat waktu, namun ada kesalahan, dan membetulkan sendiri SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar.	(Pasal 8) <ul style="list-style-type: none"> Bunga 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran.
Salah mengisi SPT, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. (Sudah dilakukan pemeriksaan namun belum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak)	(Pasal 8) <ul style="list-style-type: none"> Kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar
Melakukan suatu ketidakbenaran pajak, namun dengan kesadaran sendiri mengungkapkan ketidakbenaran tersebut dan melunasi kurang bayar pajak (Sudah dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan).	(Pasal 8) <ul style="list-style-type: none"> Denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
Kurang bayar pajak (Pembayaran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan).	(Pasal 9) <ul style="list-style-type: none"> Bunga sebesar 2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sampai dengan pembayaran dilakukan.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *Sunset Policy* memiliki dua substansi penting, yaitu penghapusan sanksi administrasi dalam masa berlakunya program dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa program. Kedua substansi tersebut diharapkan dapat mendorong kemauan membayar pajak.

2.2 Faktor-Faktor Kemauan Membayar Pajak

a) Kesadaran Membayar Pajak

Widayati dan Nurlis (2010) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

b) Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara.

Indikator kedua adalah adanya pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan (syarat-syarat) terkait pembayaran pajak. Syarat-syarat untuk melakukan pembayaran pajak adalah wajib pajak harus memiliki NPWP dan wajib pajak harus melaporkan SPT. Syarat tersebut dapat dijadikan indikator kemauan membayar pajak dengan alasan *pertama*, wajib pajak baru yang mau membayar pajak akan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan wajib pajak lama yang sudah memiliki NPWP mau membayar pajak karena kepemilikan tersebut mewajibkan untuk membayar pajak. *Kedua*, kepemilikan NPWP selanjutnya ditindaklanjuti dengan pelaporan SPT oleh wajib pajak.

c) Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Anu (2004) dalam penelitiannya menjelaskan bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengndikasikan kemauan membayar pajak . *Pertama*, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus tidak memberatkan atau sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak jika beban pajak yang

ditanggung tidak mempengaruhi kemampuan secara ekonomis. *Kedua*, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan secara adil. Dengan ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan jika wajib pajak tidak membayar pajak akan dikenai sanksi. *Ketiga*, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satunya dengan melihat pembangunan fasilitas umum. *Keempat*, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik. Bintoro (2007) berpendapat bahwa, kontrak psikologis yang dibangun oleh aparatur pajak dan wajib pajak akan berdampak pada terbentuknya moral paja yang dapat mempengaruhi wajib paja untuk membayar pajak.

2.3 Hipotesis

- H1 : *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap *Kesadaran Membayar Pajak* Wajib Pajak Badan.
- H2 : *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap *Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan* Wajib Pajak Badan.
- H3 : *Sunset Policy* berpengaruh secara positif terhadap *Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan* Wajib Pajak Badan.

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat empiris. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak badan di Kota Surakarta.

3.2 Sampel, Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak badan yang masih aktif di KPP Pratama Surakarta dengan 19 Februari 2013 berjumlah 7.623 wajib pajak badan. (database KPP Pratama Surakarta).

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *convenience sampling*. Sekaran (2006) *Convenience sampling* adalah metode pengambilan sampel secara bebas tanpa menentukan status atau keadaan responden sehingga menjadikan peneliti nyaman dalam pengambilan sampel.

Untuk menentukan besarnya ukuran sampel yang diteliti, maka digunakan rumus *Slovin* dalam Umar (2004) yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$= \frac{7.623}{1 + 7.623 \cdot 0,1^2} = \frac{7.623}{76,24} = 99,98$$

Dibulatkan menjadi 100 sampel

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditolerir atau diinginkan dalam penelitian ini adalah 0,1.

Dengan ukuran populasi (N) sebanyak 7.623 dan dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan (e) 0,1 penelitian ini menggunakan 100 sampel.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer, yang diperoleh dari penyebaran kuesioner atau angket dan wawancara. Data ini diperoleh melalui kuesioner yang disebar ke responden.

3.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi sederhana, uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengujian Instrumen Penelitian

a. Hasil Uji Reabilitas

Nilai alpha dari masing-masing variabel dependen dan variabel independen lebih besar dari 0,600 sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian tersebut memiliki tingkat reabilitas yang tinggi atau sangat reliabel.

b. Hasil Uji Validitas

Dari kesepuluh item pertanyaan variabel dependen dan independen memenuhi syarat nilai $\text{sig} < 0,05$ maka analisis dapat dilanjutkan karena dinilai sahih dan terandal (valid).

c. Hasil Uji Normalitas

Diketahui hasil uji normalitas, jika nilai signifikansi 2-tailed lebih besar dari taraf yang ditentukan yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

d. Hasil Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji heterokedastisitas ini bisa dilakukan dengan menggunakan uji glejser. Diketahui hasil uji heterokedastisitas, bahwa variabel independen memiliki nilai sig. lebih besar dari 0,05 berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi ini.

4.2 Pembahasan

Sunset Policy berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak badan di Surakarta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,171 dan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai $sig. < 0,05$, maka H_1 diterima artinya program *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap kesadaran membayar pajak pada Wajib Pajak badan di Surakarta.

Sunset Policy berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan wajib pajak badan di Surakarta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,498 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai $sig. < 0,05$, maka H_2 diterima artinya program *sunset policy* berpengaruh signifikansi terhadap pengetahuan dan pemehalan terhadap peraturan perpajakan Wajib Pajak Badan di Surakarta.

Sunset Policy berpengaruh terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak badan di Surakarta diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,352 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nlai $sig. < 0,05$, maka H_3 diterima artinya program *sunset policy* berpengaruh signifikansi terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan Wajib Pajak Badan di Surakarta.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak wajib pajak badan di Surakarta. Hal ini diperoleh dari nilai t_{hitung} sebesar 5,171 dan sig. sebesar 0,000. Karena nilai sig. < 0,05, maka H_1 diterima.
2. *Sunset Policy* berpengaruh terhadap pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan wajib pajak badan di Surakarta. Hal ini diperoleh dari nilai t_{hitung} sebesar 5,498 dan sig. sebesar 0,000. Karena nilai sig. < 0,05, maka H_2 diterima.
3. *Sunset Policy* berpengaruh terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan wajib pajak badan di Surakarta. Hal ini diperoleh dari nilai t_{hitung} sebesar 5,352 dan nilai sig. sebesar 0,000. Karena nilai sig. < 0,05, maka H_3 diterima.

5.2 Saran

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat memperluas sampel dan jangkauan penelitian dengan memperluas wilayah penelitian sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain.
2. Menambahkan variabel lain selain variabel yang digunakan dalam penelitian ini, misalnya fasilitas pengurangan tarif bagi WP Badan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini , Anindita Nur. 2012. *Faktor- Faktor Yang Mepengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Blora*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Alm, James. 1998. *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=471321. 18 Januari 2013
- Anggraeni, Monica Dian. 2011. *Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Anu, A. 2004. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Salatiga*. Skripsi tidak dipublikasi. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Bako, R. 2008. *Amnesti Pajak, Suatu Keharusan?* <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/10639>. 18 Januari 2013.
- Bida, Yance. 2001. *Pengaruh Faktor-faktor yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan PBB*. Skripsi tidak dipublikasikan . Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Darussalam. 2008. *Pengampunan Pajak dan Pemilu 2009*. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=3850&q=tax&hl=15>. 20 Februari 2013.
- Devano, S. dan S. Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. *Sunset Policy*. <http://www.pajak.go.id/>. 18 Januari 2013.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, versi 5*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Hermansyah, Wawan dan Tarjo Nurul Herawati. 2009. *Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sunset Policy*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Husein Umar, 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Irianto, Slamet Edi. 2005. *Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2003. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Mujiyati dan A. Aris. 2010. *Perpajakan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Munawir, 2003. *Pajak Penghasilan*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta. Munawir, 2003. *Pajak Penghasilan*, Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Na'Im Amali, M. 2009. *Mencermati Perumusan Masalah Kebijakan Sunset Policy*. <http://mnaimamali.blogspot.com/2008/07/mencermati-perumusan-masalah-kebijakan.html>. 20 Februari 2013.
- Pradana, Angga Satria. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sanjaya, Okta. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Masyarakat dalam Membayar Pajak: Studi Kasus Pada Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung*. http://lib.feb.ugm.ac.id/ebdl/gdl42/gdl.php?mod=browse&op=read&id=pf_eugm--sanjayaokt-439. 18 Januari 2013.
- Silitonga, Erwin. *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak*. www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=5532&coid=2&caid.
- Soemitro, Rochmat. 1965. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Eresco. Bandung.
- Supriyati dan N. Hidayati. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Makalah Akuntansi dan Teknologi Informasi Vol. 7, No. 1, hal 41-50.
- Suryarini, T dan S, Anwar. 2010. *Dampak Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Kpp Semarang Barat*. Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 2, No. 2, hal 135-146.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar*. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Utami, Pradipta Wisma. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Karanganyar)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.

Widaningrum, D. 2007. *Identifikasi kasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah*.
www.sappk.itb.ac.id/ppk/images/stories/pdf/ringkasan_dwi.pdf. 18 Januari 2013.

Widayati dan Nurlis. 2010. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pakerjaan Bebas*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.

Wijaya, H. 2008. *The Sunset Policy, Pengampunan Pajak yang Diharapkan?*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 1, 311-320.